



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPAEN KETAPANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



2023

www.bapenda.ketapangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga dapat tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 yang mana laporan ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya merupakan alat penilaian ketepatan target atau rencana aksi kinerja tahunan terhadap pencapaian yang dipantau secara berkala atau triwulanan dan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah menuju *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum di satu sisi, dan di sisi lain, merupakan suatu alat kendali, pemacu, dan sebagai umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang atas target pada kinerja berikutnya.

Dengan mengucapkan terima kasih, disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga LKPJ dan LPPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Ketapang, Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

Drs. P. Devie Frantito, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004

FORMAT PENGISIAN BAB III LKPJ

URUSAN PEMERINTAHAN : (MANAJEMEN KEUANGAN)

A. RINGKASAN DAERAH PELAKSANA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Ringkasan Kinerja dan capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL RINGKASAN KINERJA KEGIATAN UTAMA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
05.02	KEUANGAN							
05.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
5.02.01.201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
5.02.01.201.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.201.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	

5.02.01.201.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.201.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.201.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.201.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 lap	12 lap	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.201.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 lap	12 lap	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
5.02.01.202.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46 OB	46 OB	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.202.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.202.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.202.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	Tidak ada	Tidak ada	

5.02.01.202.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
5.02.01.203.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5.02.01.205.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.205.11			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Org	10 Org	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
5.02.01.206.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.206.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.206.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	

5.02.01.206.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Lap	64 Lap	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5.02.01.207.05			Pengadaan Mebel	60 Unit	60 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.207.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.207.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	12 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.02.01.208.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.208.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.208.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Lap	4 Lap	Tidak ada	Tidak ada	

5.02.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.02.01.209.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	55 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.209.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44 Unit	44 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.209.09			Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.209.10			Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108 Unit	55 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
5.02.01.209.11			Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38 Unit	38 Unit	Tidak ada	Tidak ada	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							

5.02.04.201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
04.04.02.01.01			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	<ul style="list-style-type: none"> Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah disusun dengan tidak memperhatikan potensi yang sebenarnya, atas kondisi tersebut maka berdampak pada likuiditas keuangan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan diskusi dalam forum rapat yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah pemungut Pendapatan Daerah. Hasil rapat akan menjadi dasar dalam penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah serta menjadi salah satu bahan dalam penyusunan strategi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. 	-
04.04.02.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dok	2 Dok	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Dengan melibatkan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah maka dilakukan evaluasi atas berbagai ketentuan di dalam Peraturan Daerah yang sudah ada, untuk kemudian di analisa dan di selaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bahan 	-

							penyusunan Peraturan Daerah yang baru.	
04.04.02.01.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Lap	5 Lap	<ul style="list-style-type: none"> Wajib Pajak belum memahami kewajiban perpajakan daerah dan pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan penyuluhan informasi Pajak Daerah secara masiv dan terencana serta melibatkan Perangkat Daerah lainnya dan Kejaksaan Negeri Ketapang 	-
04.04.02.01.04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kebutuhan fungsi baru di dalam aplikasi dan kebutuhan aplikasi peta penunjang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengadaan pemeliharaan aplikasi Pajak Daerah yang existing dan pengadaan aplikasi Peta PBB P2. 	-
04.04.02.01.05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Lap	1 Lap	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya. Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau. Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pendataan dan pendaftaran belum maksimal Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan menjelaskan peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak. Melakukan kerjasama dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa serta Wajib Pajak. Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan. 	-

						<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana prasarana yang digunakan untuk pendataan seperti GPS, Alat ukur/Distance dan Drone) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media sosial. Membeli alat-alat sarana pendataan (GPS, Alat ukur/Distance dan Drone) 	
04.04.02.01.06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Lap	12 Lap	<ul style="list-style-type: none"> Pagu Anggaran yang tersedia tidak terbagi habis dengan harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Bupati Ketapang. Lemahnya perencanaan kegiatan bila diselaraskan dengan pagu anggaran yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> Agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran agar alokasi Pagu Anggaran yang tersedia dapat terealisasi secara menyeluruh, dengan kata lain penyerapan anggaran dapat mencapai 100%. 	-
04.04.02.01.07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2500 Objek Pajak	2500 Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Wajib pajak kurang sadar untuk melakukan perbaikan data Data objek pajak dan wajib pajak yang kurang valid Wajib pajak kurang terbuka menyampaikan harga jual beli/pasar tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Mencari informasi harga pasar tanah terbaru Bekerjasama dengan kecamatan dan perangkat desa Memberi kesempatan ASN untuk mengikuti Diklat Penilai Pemerintah yang bersertifikat 	-

						<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada ASN/SDM yang memiliki sertifikat sebagai Penilai Pemerintah 		
04.04.02.01.08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan. • Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. • Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah. • Kurangnya Informasi / laporan terhadap objek pajak terpasang. • Luasnya objek terpasang sehingga menyulitkan dalam penetapan pajak daerah. • Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Komputer, Printonik dan Kendaraan roda 4. • Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan. • Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM. • Perlu memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak daerah. • Mengoptimalisasi pengenaan pajak yang belum akurat atau yang belum terdaftar. • Dukungan sarana dan prasarana (Komputer, Printonik dan Kendaraan roda 4) 	-
04.04.02.01.09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	800 Layanan	800 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Sosialisasi peraturan daerah 	-

						<ul style="list-style-type: none">• Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau.• Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan Pelayanan dan Konsultasi belum maksimal• Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.• Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.• Kurangnya pemahaman wajib pajak di daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaaan dan perkotaan• Keterbatasan sarana prasarana pendukung kegiatan berupa Laptop, LCD Proyektor dan speaker• Jauhnya tempat pelayanan (Bapenda) dengan daerah Kecamatan/Desa	tentang pajak daerah kepada wajib pajak. <ul style="list-style-type: none">• Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.• Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media social• Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang peraturan pajak daerah ke wajib pajak.• Melakukan pelayanan ke daerah-daerah atau kecamatan sebagai upaya mendekatkan tempat pelayanan kepada masyarakat• Menyediakan sarana prasarana Laptop, LCD Proyektor dan Speaker untuk kegiatan dilapangan			
04.04.02.01.10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	6	Dok	6	Dok	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan kerjasama dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah	-

						<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.• Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.• Letak objek pajak yang terpasang menyebar di setiap kecamatan.• Kurangnya informasi dari WP, terkait objek pajak terpasang.• Wajib pajak kurang terbuka menyampaikan data objek pajak.• Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya data yang diberikan	<p>Kecamatan dan Pemerintahan Desa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.• Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media sosial.• Memberikan pemahaman kepada wajib pajak• Melakukan penelitian berkas atau data wajib pajak			
04.04.02.01.11			Penagihan Pajak Daerah	1	Dok	1	Dok	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya.• Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau.• Belum optimalnya kegiatan penagihan pajak di lapangan karena keterbatasan anggaran.• Keterbatasan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak.• Melakukan koordinasi dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa.• Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.	-

						<p>pendukung kegiatan untuk kelapangan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.	<ul style="list-style-type: none">• Perlunya kedepan penambahan personil pemungut pajak daerah.• Pengenaan denda setiap 1 bulan keterlambatan pembayaran pajak terhutang.• Mengadakan operasi yustisi bagi Wajib Pajak yang membandel dengan mendatangkan Satpol PP, Polisi.• Perlunya memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak terhadap pajak daerah• Melakukan perbaikan data wajib pajak.	
04.04.02.01.12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan Pajak Daerah selama tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan penatausahaan berkas permohonan dalam bentuk koordinasi dengan seluruh bidang Bapenda serta melaksanakan pembinaan terhadap ASN yang bertugas dalam menindaklanjuti permohonan pengurangan Pajak Daerah	-
04.04.02.01.13			Pengendalian, Pemeriksaan dan	100 Dok	100 Dok	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi	<ul style="list-style-type: none">• Dilaksanakan pemeriksaan Pajak	-

			Pengawasan Pajak Daerah			kewajiban Perpajakan Daerah	untuk kemudian hasil pemeriksaan di tuangkan di dalam laporan hasil pemeriksaan dan menjadi dasar penerbitan surat ketetapan	
04.04.02.01.14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Lap	1 Lap	<ul style="list-style-type: none">• Pagu Anggaran yang tersedia tidak terbagi habis dengan harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Bupati Ketapang.• Lemahnya perencanaan kegiatan bila diselaraskan dengan pagu anggaran yang tersedia.• Kurang maksimalnya hasil yang didapat karena keterbatasan anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran agar alokasi Pagu Anggaran dapat terealisasi menyeluruh dan penambahan anggaran.	-
04.04.02.01.15			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Lap	1 Lap	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat kebocoran penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan kebijakan elektronifikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara digital dan terintegrasi dengan database dan sistem Bank Persepsi.	

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Satuan
1	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	10,54%	12,57%	%

TABEL CAPAIAN KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Satuan
1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	253.277.112.918,00	289.292.923.541,33	%
	Jumlah APBD	2.403.556.062.007,00	2.301.012.453.253.258,64	%

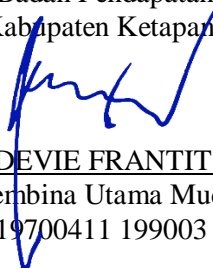
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Program	Target	Realisasi	Satuan
1	Rasio PAD	10,54%	12,57%	%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,54%	12,57%	%

TABEL CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS

No	Program	Indikator Program Prioritas	Target	Realisasi	Satuan
1	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan PAD	3.465.969.950,00	3.416.401.896,00	%

Ketapang, Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang


Drs. P. DEVIE FRANTITO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004

B. URAIAN PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.02. KEUANGAN

5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.02.04.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan DPA Nomor DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2023 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dan berlokasi di Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Target Kinerja 100%. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Adapun pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 3.465.969.950,00 setelah perubahan sebesar Rp. 3.465.969.950,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 3.416.401.896,00 atau 98,57%.

5.02.04.1.01.01 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp. 131.500.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.131.499.948 dengan Persentase sebesar 99,99 %. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target penerimaan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari APBD Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun anggaran yaitu ketika proses penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan serta melibatkan seluruh Perangkat Daerah pemungut Pendapat Daerah.

Permasalahan :

- Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah disusun dengan tidak memperhatikan potensi yang sebenarnya, atas kondisi tersebut maka berdampak pada likuiditas keuangan Daerah.

Solusi :

- Melaksanakan diskusi dalam forum rapat yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah pemungut Pendapatan Daerah. Hasil rapat akan menjadi dasar dalam penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah serta menjadi salah satu bahan dalam penyusunan strategi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

5.02.04.1.01.02 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 17.800.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.800.000 dengan Persentase sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi atas kebijakan perpajakan daerah baik yang di tuangkan di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati maupun yang di tuangkan di dalam Keputusan Bupati

Permasalahan :

- Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Solusi :

- Dengan melibatkan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah maka dilakukan evaluasi atas berbagai ketentuan di dalam Peraturan Daerah yang sudah ada, untuk kemudian di analisa dan di selaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang baru.

5.02.04.1.01.03

Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 87.917.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.67.845.389 dengan Persentase sebesar 77,17 %. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan informasi terkait pajak Daerah kepada Wajib Pajak di wilayah pemungutan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi tatap muka, media cetak dan media elektronik serta dilaksanakan sepanjang tahun.

Permasalahan :

- Wajib Pajak belum memahami kewajiban perpajakan daerah dan pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang.

Solusi :

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan informasi Pajak Daerah secara masiv dan terencana serta melibatkan Perangkat Daerah lainnya dan Kejaksaan Negeri Ketapang.

5.02.04.1.01.04

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 543.338.950 dan realisasi anggaran sebesar Rp.538.029.810 dengan Persentase sebesar 99,02%. Kegiatan ini bertujuan menyediakan pemeliharaan aplikasi yang existing, pengadaan aplikasi baru, dan penyediaan peralatan penunjang aplikasi Pajak Daerah.

Permasalahan :

- Terdapat kebutuhan fungsi baru di dalam aplikasi dan kebutuhan aplikasi peta penunjang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Solusi :

- Melaksanakan pengadaan pemeliharaan aplikasi Pajak Daerah yang existing dan pengadaan aplikasi Peta PBB P2.

5.02.04.1.01.05

Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengembangan informasi data objek pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan serta objek pajak dan wajib pajak yang belum terdaftar PBB-P2. Dengan cara mengumpulkan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak baru, mengupdate data objek dan subjek pajak yang sudah ada, penggalan potensi melalui pemutakhiran data Objek dan subjek pajak daerah yang baru.

Dengan realisasi 100% Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp 242.657.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 241.847.300,00 atau 99,67 %

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya.
- Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau.
- Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pendataan dan pendaftaran belum maksimal
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.
- Kurangnya sarana prasarana yang digunakan untuk pendataan seperti GPS, Alat ukur/Distance dan Drone)

Solusi :

- Melakukan koordinasi dan menjelaskan peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak.
- Melakukan kerjasama dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa serta Wajib Pajak.
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media sosial.
- Membeli alat-alat sarana pendataan (GPS, Alat ukur/Distance dan Drone)

5.02.04.1.01.06**Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Pelaporan dengan tujuan untuk memperkuat Basis Data Pajak Daerah dan berkolaborasi dengan OPD pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai mulai bulan Januari s/d Desember 2023 dengan pembentukan TIM lintas SKPD. Selain itu dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Bapenda Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi dengan pihak provinsi mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk bagian Kabupaten Ketapang. Hasil yang didapat adalah terselenggaranya rekonsiliasi pendapatan daerah dalam upaya menunjang basis data pajak daerah, meskipun kurang optimalnya penyelenggaraan rekonsiliasi dan koordinasi ke ibu kota provinsi.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Perubahan sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 398.601.803,- atau 99,65%.

Permasalahan :

- Pagu Anggaran yang tersedia tidak terbagi habis dengan harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Bupati Ketapang.
- Lemahnya perencanaan kegiatan bila diselaraskan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Solusi :

- Agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran agar alokasi Pagu Anggaran yang tersedia dapat terealisasi secara menyeluruh, dengan kata lain penyerapan anggaran dapat mencapai 100%.

5.02.04.1.01.07**Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Kegiatan Penilaian PBB P2 serta BPHTB adalah kegiatan dalam rangka mencari informasi NJOP harga tanah terbaru guna untuk evaluasi ketetapan NJOP serta pemuktahiran data-data objek pajak daerah. Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh Bidang Pengelola PBB dan BPHTB yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Tujuan kegiatan ini dilakukan sebagai bahan evaluasi perubahan NJOP dan perbaikan data wajib pajak . Bidang PBB dan BPHTB berhasil memperoleh data-data NJOP atau harga pasar terbaru yang ada di kabupaten Ketapang.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar 169.600.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 169.548.000 atau 99.97 %

Pemasalahan :

- Wajib pajak kurang sadar untuk melakukan perbaikan data
- Data objek pajak dan wajib pajak yang kurang valid
- Wajib pajak kurang terbuka menyampaikan harga jual beli/pasar tanah
- Belum ada ASN/SDM yang memiliki sertifikat sebagai Penilai Pemerintah

Solusi :

- Mencari informasi harga pasar tanah terbaru
- Bekerjasama dengan kecamatan dan perangkat desa
- Memberi kesempatan ASN untuk mengikuti Diklat Penilai Pemerintah yang bersertifikat

5.02.04.1.01.08**Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Penetapan Pajak Daerah dimana target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya laporan penetapan pajak daerah terutama pajak reklame dan pajak air tanah serta penyusunan laporan penetapan pajak daerah yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD perubahan Rp. 328.344.00,- dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 327.261.750,- atau 99,67%.

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.
- Kurangnya Informasi / laporan terhadap objek pajak terpasang.
- Luasnya objek terpasang sehingga menyulitkan dalam penetapan pajak daerah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Komputer, Printonik dan Kendaraan roda 4.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Solusi :

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Perlu memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak daerah.
- Mengoptimalkan pengenaan pajak yang belum akurat atau yang belum terdaftar.
- Dukungan sarana dan prasarana (Komputer, Printonik dan Kendaraan roda 4)

5.02.04.1.01.09**Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan Pelayanan dan Konsultasi pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, transparan serta mewujudkan hak-hak public untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Perubahan sebesar Rp. 239.961.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 239.778.000,00 atau 99,92%.

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya.
- Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau.
- Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan Pelayanan dan Konsultasi belum maksimal
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- Kurangnya pemahaman wajib pajak di daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaaan dan perkotaan
- Keterbatasan sarana prasarana pendukung kegiatan berupa Laptop, LCD Proyektor dan speaker
- Jauhnya tempat pelayanan (Bapenda) dengan daerah Kecamatan/Desa

Solusi :

- Melakukan Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media social
- Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang peraturan pajak daerah ke wajib pajak.
- Melakukan pelayanan ke daerah-daerah atau kecamatan sebagai upaya mendekatkan tempat pelayanan kepada masyarakat
- Menyediakan sarana prasarana Laptop, LCD Proyektor dan Speaker untuk kegiatan dilapangan

5.02.04.1.01.10**Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Kegiatan Penelitian dan Verifikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penelitian kembali data laporan objek pajak yang telah disampaikan. Kegiatan ini dilakukan guna menghasilkan data objek pajak dan wajib pajak yang sebenarnya sesuai dengan yang ada dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelola PBB dan BPHTB dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun.

Kegiatan ini didukung dana APBD perubahan sebesar Rp. 123.930.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 122.050.000,- atau 98,48%.

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.
- Letak objek pajak yang terpasang menyebar di setiap kecamatan.
- Kurangnya informasi dari WP, terkait objek pajak terpasang.
- Wajib pajak kurang terbuka menyampaikan data objek pajak.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya data yang diberikan

Solusi :

- Melakukan kerjasama dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media sosial.
- Memberikan pemahaman kepada wajib pajak
- Melakukan penelitian berkas atau data wajib pajak

5.02.04.1.01.11**Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah 1 dokumen penagihan pajak daerah dimana target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang terutang pajak, dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Perubahan sebesar Rp. 489.108.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 488.864.800,- atau 99,95%

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya.
- Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau.
- Belum optimalnya kegiatan penagihan pajak di lapangan karena keterbatasan anggaran.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

Solusi :

- Melakukan Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak.
- Melakukan koordinasi dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Perlunya kedepan penambahan personil pemungut pajak daerah.
- Pengenaan denda setiap 1 bulan keterlambatan pembayaran pajak terhutang.
- Mengadakan operasi yustisi bagi Wajib Pajak yang membandel dengan mendatangkan Satpol PP, Polisi.
- Perlunya memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak terhadap pajak daerah
- Melakukan perbaikan data wajib pajak.

5.02.04.2.01.12**Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 17.906.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.894.371 dengan Persentase sebesar 99,94%. Kegiatan ini bertujuan untuk menatausahakan permohonan Keberatan, Banding, dan Pengurangan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak Daerah. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun dan melibatkan seluruh Bidang Bapenda.

Permasalahan :

- Terdapat Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan Pajak Daerah selama tahun 2023.

Solusi :

- Dilakukan penatausahaan berkas permohonan dalam bentuk koordinasi dengan seluruh bidang Bapenda serta melaksanakan pembinaan terhadap ASN yang bertugas dalam menindaklanjuti permohonan pengurangan Pajak Daerah

5.02.04.2.01.13**Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 373.908.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.366.789.725 dengan Persentase sebesar 98,09%. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Pajak Daerah agar penerimaan Pajak Daerah menjadi lebih optimal. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun dan dalam melaksanaannya dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

Permasalahan :

- Terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakan Daerah

Solusi :

- Dilaksanakan pemeriksaan Pajak untuk kemudian hasil pemeriksaan di tuangkan di dalam laporan hasil pemeriksaan dan menjadi dasar penerbitan surat penetapan

5.02.04.2.01.14

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bidang Pelaporan dengan pelaksana kegiatan dilakukan ke kecamatan-kecamatan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun kecamatan yang dikunjungi dalam rangka verifikasi dan klarifikasi lapangan antara lain : Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan MH Selatan, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai dan Kecamatan Sei Melayu. Kendatipun demikian tidak seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut yang dapat dikunjungi mengingat anggaran terbatas. Tujuan dari kunjungan ini adalah pemutakhiran data piutang PBB-P2 untuk dihapuskan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Hasil yang didapat adalah cleansing pajak daerah khususnya PBB-P2 dengan data mulai tahun 2001 s/d tahun 2017 sebesar 79.958 objek pajak dengan nilai Rp 1.883.038.990,-. Untuk Retribusi Daerah tidak maksimal dijalankan karena keterbatasan anggaran.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 243.487.000,- atau 97,39 %

Permasalahan :

- Pagu Anggaran yang tersedia tidak terbagi habis dengan harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Bupati Ketapang.
- Lemahnya perencanaan kegiatan bila diselaraskan dengan pagu anggaran yang tersedia.
- Kurang maksimalnya hasil yang didapat karena keterbatasan anggaran

Solusi :

- Lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran agar alokasi Pagu Anggaran dapat terealisasi menyeluruh dan penambahan anggaran.

5.02.04.2.01.15

Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Jumlah Alokasi Anggaran perubahan sebesar Rp. 50.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.45.124.000 dengan Persentase sebesar 90,25 % dengan pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk merubah pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tunai menjadi non tunai. Kegiatan ini mengikutsertakan Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah yang bertugas sebagai koordinator Belanja Daerah.

Permasalahan :

- Terdapat kebocoran penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Solusi :

- Menerapkan kebijakan elektronifikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara digital dan terintegrasi dengan database dan sistem Bank Persepsi.

**DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023**

OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
URUSAN : PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)

Daftar rincian nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2022	206.354.014.491,00	230.065.826.467,22	111,49%
2023	253.277.112.918,00	289.292.923.541,33	114,22%

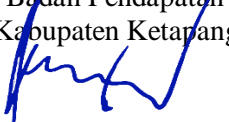
Daftar rincian Total PAD dalam APBD Tahun 2022

Tahun	Total Anggaran PAD Sebelum Perubahan	Total Anggaran PAD Setelah Perubahan
2022	185.326.784.358,00	206.354.014.491,00
2023	200.326.784.408,00	253.277.112.918,00

Daftar rincian jumlah PAD Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.277.112.918,00	289.292.923.541,33	114,22%
Hasil Pajak Daerah	138.779.633.774,00	152.138.741.445,21	109,63%
Hasil Retribusi Daerah	6.472.648.100,00	6.452.053.564,00	99,68%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.069.704.038,00	8.008.738.594,12	99,24%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99.955.127.006,00	122.693.389.938,00	122,75%

Ketapang, Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

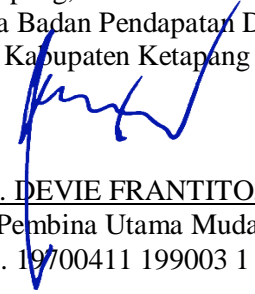


Drs. P. DEVIE FRANTITO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004

LAMPIRAN III. 3 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2023

NO	DEFINISI	RUMUS/PERSAMAAN	Data Perhitungan/Capaian Kinerja			
			2022		Tahun 2023	
1	2	3	4		5	
URUSAN WAJIB						
1	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$	230.065.826.467,22	~ 1) x 100%	289.292.923.541,33	~ 1) x 100%
			206.354.014.491,00		253.277.112.918,00	
2	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	Nilai Absolut dari PAD dalam Realisasi	230.065.826.467,22	x 100%	298.192.085.498,74	x 100%
		Total PAD dalam APBD	206.354.014.491,00		253.277.112.918,00	

Ketapang, Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang


Drs. P. DEVIE FRANTITO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004